

# **RENCANA KERJA (RENJA)**

## **TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Npmor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, maka dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang di singkat Renja Perangkat Daerah.

Perencanaan memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah. Melalui perencanaan yang baik, diharapkan tujuan pembangunan yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA), yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis OPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Mamuju melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang berpedoman kepada RENSTRA Perangkat Daerah, hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu dan hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun berjalan.

Rancangan Renja perangkat daerah dibahas pada forum organisasi perangkat daerah, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah

Berdasarkan peraturan perundangan diatas maka disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Mamuju dan Rencana Strategis (Renstra) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2024 dengan Tema **“KEREN III Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan”** dengan prioritas *“Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif”* yang terdiri dari :

1. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian
  - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Pemerataan infrastruktur perkotaan yang berkualitas
  - Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah
3. Penguatan satabilitas wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya
  - Meningkatnya ketentramandan ketertiban umum
  - Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
4. Penguatan ekonomi daerah yang inklusif
  - Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan Daerah
  - Meningkatnya kemandirian desa
  - Meningkatnya penyerapan tenaga kerja

5. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsive

- Meningkatkan kinerja keuangan dan pengawasan
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Mamuju memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi RPJMD dan Program dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Mamuju dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas antara lain, membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan umum, pelayanan perijinan tertentu dan pelayanan non perijinan secara terpadu melalui satu pintu.

Renja DPM-PTSP tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam Renstra DPM-PTSP Kabupaten Mamuju Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja DPM-PTSP Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024.

Dalam konteks Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dituntut untuk mampu menggali dan memasarkan potensi daerah yang ada, melakukan promosi investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. DPM-PTSP dituntut untuk memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah melalui penataan dunia usaha agar mendukung pencapaian indikator makro ekonomi daerah dimana pada setiap digit pertumbuhan ekonomi mampu

memberikan dampak positif terhadap dunia usaha, ketersediaan lapangan pekerjaan yang bermuara pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Subtansi dan muatan Renja Perangkat Daerah meliputi :

1. Program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru
2. Lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama desa/Kel. atau kecamatan
3. Indikator Kinerja yang terdiri dari kinerja Program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif yang akan dicapai dari program dan indikator kinerja Kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan
4. Kelompok Sasaran yang memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan kelompok masyarakat yang rentan termarginalkan
5. Pagu Indikatif dan Perkiraan Maju, memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Renja perangkat daerah disusun melalui tahapan sebagai berikut ;

1. Persiapan penyusunan Renja OPD,
2. Penyusunan rancangan Renja OPD
3. Pelaksanaan forum OPD
4. Penetapan Renja OPD.

Renja DPM-PTSP Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) 2021 - 2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Renstra OPD DPM-PTSP di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju nomor 71 tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal
2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perijinan
3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi.
4. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi, data dan pelaporan
5. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas pokok organisasi
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-Undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja DPM-PTSP Kabupaten Mamuju Tahun 2024:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor. 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817) ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Pintu Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 02);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja



Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju;

21. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 45);

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Renja DPM-PTSP Tahun 2024 adalah untuk menjabarkan RKPD 2024 dan Renstra DPM-PTSP Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 terutama yang terkait dengan urusan wajib non pelayanan dasar, yakni urusan bidang penanaman modal.

Tujuan penyusunan Renja DPM-PTSP adalah sebagai Acuan bagi Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi misi Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 dan sebagai pedoman penyusunan RAPBD.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja DPM-PTSP Kabupaten Mamuju Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB. I PENDAHULUAN**

Pada Bab dijelaskan mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan Renja DPM-PTSP Tahun 2024.

#### **BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Programdan Kegiatan Masyarakat.

**BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, Telaahan terhadap kebijakan provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan.

**BAB. IV RENCANA KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Bab ini meliputi tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Mamuju.

**BAB. V PENUTUP**

Bab Penutup terdiri dari Penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan ditahun-tahun mendatang.

Kondisi Daerah Kabupaten Mamuju terkait dengan urusan penanaman modal salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja utama adalah pertumbuhan investasi. Ini sangat diperlukan untuk menjamin agar program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya: Dokumen RPJMD 2021-2026, RKPD Tahunan, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mamuju dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kerja DPM-PTSP Tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, pelaksanaan kinerja DPM-PTSP Kabupaten Mamuju ditunjang dengan belanja tidak langsung yang anggarannya diperuntukkan untuk belanja operasi daerah diperuntukkan untuk belanja OPD dan Belanja Publik dengan ruang lingkup kegiatannya (*Sesuai tabel TC. 29 Matriks Evaluasi terlampir*).

**TABEL II.1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA DPM-PTSP s/d TAHUN 2023**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021-2026 (Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD tahun 2022			Target Program/ Kegiatan Renja OPD tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2023		Catatan
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi			Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar											
	1. Urusan Penanaman Modal											
	DPM-PTSP											
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen/laporan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	3	2	2	100%	2	2	78%	

				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	1	1	100%	1	1	100%		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	1	1	100%	1	1	100%		
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	1	1	100%	1	1	100%		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	1	1	100%	1	1	100%		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dokumen	1	1	1	100%	1	1	100%		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dokumen	4	4	4	100%	4	4	100%		
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	Org/Bln	37	33	33	100%	37	36	94%		

			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	0	0	0	0%	0	0	0%
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	4	Dokumen	4	4	4	100%	4	4	100%
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	0	0	0	0%	0	0	0%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	0	0	0	0%	0	0	0%
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Laporan	0	0	0	0%	0	0	0%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	2	2		0%	2	1	67%

			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Laporan	0	0	0	0%	0	0	0%
			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100	Persen	0%	0%	0%	0%	100%	33.33%	33%
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	0	0	0	0%	4	1	33%
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	38	Paket	0	0	0	0%	0	0	0%
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	38	Dokumen	3	33	33	100%	37	24	64%
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	38	Dokumen	0	0	0	0%	0	0	0%
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	Orang	0	0	0	0%	1	0	33%

			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang -undangan	1	Orang	0	0	0	0%	0	0	0%
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	0	0	0	0%	0	0	0%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10	Paket	24	37	37	100%	10	24	237%
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket	1	0	0	0%	1	1	33%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5	Paket	1	0	0	0%	0	0	7%
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1	Paket	1	2	2	0%	2	2	167%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	2	Dokumen	0	0	0	0%	0	0	0%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	30	Laporan	10	20	29	145%	25	21	71%



			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	3	Dokumen	0	0	0	0%	0	0	0%
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan oemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>66.67%</b>	<b>67%</b>
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1	Unit	0	0	0	0%	0	0	0%
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1	Unit	0	0	0	0%	0	0	0%
			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	3	Unit	0	0	0	0%	0	0	0%
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	Unit	0	2	2	100%	2	1	133%
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	Unit	0	0	0	0%	0	0	0%
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2	Unit	0	0	0	0%	0	0	0%

			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunanlainnya yang disediakan	2	Unit	0	0	0	0%	0	0	0%	
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	35	Laporan	0	0	0	0%	0	0	0%	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	3	Laporan	3	3	3	100%	3	3	100%	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Laporan	1	2	2	100%	1	1	133%	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	Laporan	3	17	17	100%	16	12	1200%	
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	Unit	18	5	14	280%	14	15	110%	

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	25	18	18	100%	10	18	177%	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	0	0	0	0%	0	0	0%	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	0	0	0	0%	0	0	0%	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	0	0	0	0%	0	0	0%	
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>											
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Penanaman Modal</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>46%</b>	<b>100.00%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>	<b>73.67%</b>	<b>74%</b>	
			<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase jumlah regulasi urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>	<b>66%</b>	<b>66%</b>	<b>100%</b>	<b>83.67%</b>	<b>84%</b>	

			Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	1	3	2	67%	3	2	200%
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1	Kegiatan Usaha	0	0	0	0%	0	0	0%
			<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peta Potensi investasi tersedia</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>66.67%</b>	<b>67%</b>
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0	1	1	100%	1	1	67%
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi	1	Dokumen	0	0	0	0%	0	0	0%
			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Peningkatan Investor</b>	<b>35</b>	<b>Investor</b>	<b>55</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>113%</b>	<b>44</b>	<b>47.67</b>	<b>136%</b>
			<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Jumlah Promosi Investasi investasi diikuti</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>33%</b>	<b>11%</b>	<b>11%</b>
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0	1	0	0%	1	0	33%

				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	2	Dokumen	0	0	0	0%	0	0	0%	
				<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>47.34%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>82.45%</b>	<b>82%</b>	
				<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan online</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	105	Pelaku Usaha	91	85	4321	5084%	90	1500.67	1429%	
				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	130	Kegiatan Usaha	8	360	178	49%	100	95.33	73%	
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	30	Orang	16	22	101	459%	24	47.00	157%	

			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1	Kegiatan Usaha	0	3	26	867%	3	9.67	967%	
			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal</b>	<b>50</b>	<b>Persen</b>	<b>47%</b>	<b>50%</b>	<b>44%</b>	<b>89%</b>	<b>50%</b>	<b>47.10%</b>	<b>94%</b>	
			<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pelaku usaha yang melaporkan LKPM</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>49%</b>	<b>70%</b>	<b>12.6%</b>	<b>18%</b>	<b>75%</b>	<b>45.53%</b>	<b>46%</b>	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	15	Kegiatan Usaha	122	12	106	883%	12	80.00	533%	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	260	Pelaku Usaha	332	260	338	130%	260	310.00	119%	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	13	Kegiatan Usaha	120	130	217	167%	12	116.33	895%	
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Laporan database Perizinan dan Non Perizinan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

				<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100%</b>	
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12	Dokumen	12	12	12	100%	12	12	100%	

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan Nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan Pembangunan Nasional dan perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional yang dikenal dengan proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Meskipun sistem musrenbang sudah dikembangkan lebih baik, dalam pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten masih belum optimal (*tabel TC. 30 Analisis Kinerja Pelayanan OPD terlampir*)



Tabel 2 (T-C.30.)

Matriks Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Indikator (tujuan dan sasaran strategis)	SPM/ Standar Nasional Kemendagri	IKK	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)			(5)	(6)	(7)	(8)	9	(9)	(10)	(11)	(15)
1	<b>Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA</b>			Persen	15 %	15 %	15 %	15 %	64,88 %	0	15 %	15%	
2	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)			Milyar/ Rupiah	Rp 325,000,000,000	Rp 340,000,000,000	Rp 355,000,000,000	Rp 360,000,000,000	Rp. 233.011.120.099	Rp -	Rp355,000,000,000	Rp 360,000,000,000	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Nilai	90	90	90	90	90,33	0	90,31	90, 33	
4	NILAI AKIP OPD			Predikat	B	B	B	BB	B	-	B	-	

5	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			Persen	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
6	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal			Persen	50%	50%	50%	50%	44,34	0%	50%	50%	
7	Persentase Laporan Database Perizinan dan Non Perizinan			Persen	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
8			Jumlah Peningkatan Investor	Investor	39 Investor	44 Investor	51 Investor	59 Investor	44 Investor	0	51 Investor	59 Investor	

Pada indikator jumlah nilai investasi (PMA/PMDN) tidak dapat dicapai karena beberapa factor diantaranya ;

1. Belum lengkapnya perizinan utamanya pada sektor lingkungan sehingga terhambat dalam melaporkan LKPM.
2. Kurangnya pemahaman pelaporan LKPM.
3. Rendahnya inisiatif untuk melaporkan LKPM
4. Adanya hambatan -hambatan dalam merealisasikan investasi utamanya pada investasi bernilai besar (seperti DND Hydro dan Mamuju Tumbuan Energy)
5. Belum tersedianya peta potensi sebagai bahan promosi investasi daerah
6. Masih kurangnya regulasi pendukung dalam membuka keran investasi (seperti RDTR dan RTRW).

Melihat kondisi tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju selaku pelaksana urusan wajib non pelayanan dasar penanaman modal mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi dengan pelaku usaha/investasi;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, baik antar daerah antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksana dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju yaitu merumuskan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menghadapi beberapa kendala diantaranya :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (Isu strategis RPJMD)
2. Peningkatan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan kenyamanan bagi penerima layanan
3. Peningkatan Profesionalisme layanan guna mendorong tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah Kabupaten Mamuju
4. Peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pada

pelaksanaan pengendalian penanaman modal

5. Peningkatan pelayanan publik baik layanan perizinan maupun non perizinan dengan mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi ( Isu strategis RPJMD)
6. Penataan regulasi daerah dalam rangka memberi kepastian hukum dalam bidang pelayanan publik dan penanaman modal
7. Peningkatan Koordinasi antar OPD Teknis dengan DPM-PTSP dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan public.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tetap sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja OPD (*Sesuai Matriks Review Ranwal RKPD TC. 31 Terlampir*)

**TABEL 3 (T- C.31)**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024**  
**KABUPATEN MAMUJU**

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Mamuju</b>	<b>Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>3.349.962.778</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Mamuju</b>	<b>Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>3.268.739.024</b>	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase ketersediaan dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	15,199,800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase ketersediaan dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	14,676,780	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,100,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,731,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	2,100,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	2,638,800	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	3, 150, 000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	2, 458, 200	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	2, 100, 000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	2, 474, 400	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	2, 100, 000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1, 427, 200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1, 549, 800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	734, 800	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2, 100, 000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3, 211, 880	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.024.797.978	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.718.096.144	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mamuju	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	33 Orang	2.992.247.978	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mamuju	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	33 Orang/Bulan	2.646.555.244	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dpkumen	26,250,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	59,087,900	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	6,300,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	12,453,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase ketersediaan Administrasi kepegawain Pada Perangkat Daerah	100 Persen	3,150,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase ketersediaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 Persen	3,289,400	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	3,150,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	3,289,400	

	Administrasi Kenepegawai an Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase ketersediaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 Per sen	16,300,000	Administrasi Kenepegawai an Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase ketersediaan Administrasi kepegawai an Pada Perangkat Daerah	100 Per sen	38,741,000	
	Pengadaan Pakai an Di nas Beserta Atri but dan kelengkapannya	Mamuju	Jum lah Paket Pakai an Di nas beserta Atri but Kelengkapan	33 Pak et	0	Pengadaan Pakai ana Di nas Beserta Atri but dan kelengkapannya	Mamuju	Jum lah Paket Pakai an Di nas beserta Atri but Kelengkapan	0 Pake t	0	
	Pendataan dan Pengolahan Admi nistrasi Kepegawai an	Mamuju	Jum lah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Admi nistrasi Kepegawai an	33 Dok umen	6,300,000	Pendataan dan Pengolahan Admi nistrasi Kepegawai an	Mamuju	Jum lah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Admi nistrasi Kepegawai an	33 Dok umen	2,000,000	
	Pendi di kan dan Pel ati han Pegawai Berdas arkan Tugas dan Fungsi	Mamuju	Jum lah Pegawai Berdas arkan Tugas dan Fungsi yang Mengi kuti Pendi di kan dan Pel ati han	1 Or ang	10,000,000	Pendi di kan dan Pel ati han Pegawai Berdas arkan Tugas dan Fungsi	Mamuju	Jum lah Pegawai Berdas arkan Tugas dan Fungsi yang Mengi kuti Pendi di kan dan Pel ati han	1 Or ang	36,741,000	
	Pengadaan Barang Mi lik Daerah Penuni ang Urusan Pemer int ah Daerah	Mamuju	Persentase ketersediaan barang milik daerah penuni ang urusan pemer int ah daerah	100 Per sen	105.000.000	Pengadaan Barang Mi lik Daerah Penuni ang Urusan Pemer int ah Daerah	Mamuju	Persentase ketersediaan barang milik daerah penuni ang urusan pemer int ah daerah	100 Per sen	30,130,000	
	Pengadaan Mebel	Mamuju	Jum lah Paket Mebel yang Di sedi akan	8 Uni t	10,000,000	Pengadaan Mebel	Mamuju	Jum lah Paket Mebel yang Di sedi akan	1 Uni t	630,000	
	Pengadaan Peral atan dan Mes in Lai nnya	Mamuju	Jum lah Uni t Peral atan dan Mes in Lai nnya yang Di sedi akan	1 Uni t	10,000,000	Pengadaan Peral atan dan Mes in Lai nnya	Mamuju	Jum lah Uni t Peral atan dan Mes in Lai nnya yang Di sedi akan	2 Uni t	26,500,000	
	Pengadaan Gedung Kant or atau Bangunan Lai nnya	Mamuju	Jum lah Uni t Gedung Kant or atau Bangunan Lai nnya yang Di sedi akan	1 Uni t	60,000,000	Pengadaan Gedung Kant or atau Bangunan Lai nnya	Mamuju	Jum lah Uni t Gedung Kant or atau Bangunan Lai nnya yang Di sedi akan	0 Uni t	0	



	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas	100 Persen	25,515,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mamuju	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas	100 Persen	113.422.700	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mamuju	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	525,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mamuju	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	2,750,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	8,400,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	4,287,400	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	525,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	840,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1,584,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	15,750,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	104,801,300	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	120.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	310.680.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	90.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	207.480.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	24.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	28.800.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	74.400.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	3 ienis	40.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100 Persen	39.703.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Di nas atau Kendaraan Di nas Jabatan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Di nas atau Kendaraan Di nas Jabatan yang Di pelihara dan di bayarkan Pajaknya	14 Unit	20.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Di nas atau Kendaraan Di nas Jabatan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Di nas atau Kendaraan Di nas Jabatan yang Di pelihara dan di bayarkan Pajaknya	14 Unit	33.753.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Di pelihara	18 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Di pelihara	12 Unit	5.950.000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	Mamuju			<b>827.762.326</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	Mamuju			<b>634.516.220</b>	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIPENANAMAN MODAL</b>	Mamuju	<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Penanaman Modal</b>	<b>100 %</b>	<b>307.500.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIPENANAMAN MODAL</b>	Mamuju	<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Penanaman Modal</b>	<b>100 %</b>	<b>23,645,720</b>	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju	Persentase jumlah regulasi urusan pemerintah daerah	100 %	107.500.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju	Persentase jumlah regulasi urusan pemerintah daerah	100 %	14,322,720	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Mamuju	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	57,500,000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Mamuju	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	10,332,000	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Mamuju	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	3 Kegiatan Usaha	50,000,000	Fasilitasi kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKMd daerah	Mamuju	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	3 Dokumen	3,990,720	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Mamuju	Persentase Peta Potensi investasi tersedia	100 %	200.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Mamuju	Persentase Peta Potensi investasi tersedia	100 %	9,323,000	

	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,000,000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	7,537,000	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Mamuju	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,000,000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Mamuju	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1,786,000	
	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Mamuju	<b>Persentase peningkatan Jumlah Investor</b>	<b>51</b>	<b>investor</b>	<b>71,750,000</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Mamuju	<b>Jumlah Peningkatan Investor</b>	<b>51</b>	<b>investor</b>	<b>4,615,000</b>	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju	Persentase Jumlah Promosi Investasi investasi diikuti	33	%	71,750,000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju	Persentase Jumlah Promosi Investasi investasi diikuti	33	%	4,615,000	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Mamuju	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	21,750,000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Dokumen	2,152,000	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Dokumen	50,000,000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Mamuju	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal kab/kota	1	Dokumen	2,463,000	
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Mamuju	<b>Persentase Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>92,250,001</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Mamuju	<b>Persentase Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>59,999,500</b>	

	Pel avanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bi dang Penanaman Modal yang meni adi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Mamuju	Persentase Perizinan Umum Terl avani dengan onli ne	100 %	92, 250, 001	Pel avanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bi dang Penanaman Modal yang meni adi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Mamuju	Persentase Perizinan Umum Terl avani dengan onli ne	100 %	59, 999, 500	
	Penyedi aan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Mamuju	Juml ah Pel aku Usaha yang Mendapat kan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	90 Pel aku usaha	21, 325, 206	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Mamuju	Juml ah Kegi atan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang meni jadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	9, 315, 500	
	Pemant auan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Mamuju	Juml ah Kegi atan Usaha dari Pel aku Usaha yang Mendapat Pemant auan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	110 Keg . Usaha	21, 331, 206	Penyedi aan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Mamuju	Juml ah Pel aku Usaha yang Mendapat kan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	97 Pel aku usaha	35, 684, 500	

	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Mamuju	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	24 Orang	28, 856, 504	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Mamuju	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	26 Pelaku usaha	3, 852, 500	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Mamuju	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	3 Keg. Usaha	20, 737, 085	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Mamuju	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	110 Keg. Usaha	11, 147, 000	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Mamuju	<b>Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal</b>	<b>50 %</b>	<b>330. 637. 325</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Mamuju	<b>Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal</b>	<b>50 %</b>	<b>532. 100. 000</b>	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju	Persentase pelaku usaha yang melaporkan LKPM	85 %	330. 637. 325	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju	Persentase pelaku usaha yang melaporkan LKPM	85 %	532. 100. 000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Mamuju	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan	15 Keg. Usaha	75, 637, 325	Penyelesaian permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Mamuju	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan	15 Keg. Usaha	34, 632, 000	

			Pelaksanaan Penanaman Modal					Kegiatan Usahanya				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembiayaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Mamuju	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembiayaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1	Pelaku usaha	130,000,000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Mamuju	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	350	Pelaku usaha	332,578,300
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Mamuju	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	12	Keg. Usaha	125,000,000	Pengawasan Penanaman Modal	Mamuju	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Di analisa dan Di verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	90	Keg. Usaha	164,889,700
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Mamuju</b>	<b>Persentase Laporan database Perizinan dan Non Perizinan</b>	<b>100 %</b>		<b>25,625,000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Mamuju</b>	<b>Persentase Laporan database Perizinan dan Non Perizinan</b>	<b>100 %</b>		<b>14,156,000</b>

	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju	Persentase Pengolahan Data dan Penvusunan Laporan	100 %	25, 625, 000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mamuju	Persentase Pengolahan Data dan Penvusunan Laporan	100 %	14, 156, 000	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Mamuju	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Di kaji dan Di manfaatkan	12 Dokumen	25, 625, 000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Mamuju	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Di kaji dan Di manfaatkan	12 Dokumen	14, 156, 000	
					<b>4,177,725,104</b>					<b>3,903,255,244</b>	



## 2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja DPM-PTSP Tahun 2024 Merupakan rencana kerja tahunan dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju. Rencana Kerja DPM-PTSP Tahun ini disusun dengan tetap berpedoman pada dokumen RPJMD, Renstra, dan RKPD Kabupaten Mamuju, namun tetap memperhatikan usulan program dari berbagai pihak baik dari usulan masyarakat (Musrenbang) maupun dari pemangku kepentingan, LSM bila ada. Dalam konteks perencanaan pembangunan, DPM-PTSP Kabupaten Mamuju dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan melayani dan memahami kebutuhan masyarakat. Disisi lain DPM-PTSP selalu siap dan sanggup untuk membuat dan menyusun suatu perencanaan yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Penelaahan usulan program dan kegiatan oleh masyarakat melalui kegiatan musrembang yang telah dilaksanakan di kecamatan yang ada di kabupaten Mamuju secara spesifik tidak ada yang terkait langsung dengan penyelenggaraan urusan wajib penanaman modal maupun terkait pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Namun demikian aspirasi dan harapan dari masyarakat terkait peningkatan pelayanan publik diperoleh dari berbagai media, diantaranya adalah melalui layanan pengaduan yang tersedia diantaranya loket pengaduan secara langsung, website, media sosial (facebook), sms gateway dan media lainnya.

Telaahan terhadap masukan dan saran dari lembaga formal seperti ombudsman maupun LSM serta instrumen hasil survey indeks kepuasan masyarakat juga tetap dilakukan guna mengefektifkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar tepat guna dan tepat sasaran.

*(Daftar usulan Musrembang dan Hasil Reses Tabel TC. 32)*

**Tabel 4 (T-C.32.)  
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023  
KABUPATEN MAMUJU**

**OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
<b>I</b>	<b>Program.....</b>				
1	Kegiatan.....				
2	Kegiatan.....	TIDAK ADA			
3	Kegiatan.....				
<b>II</b>	<b>Program.....</b>				
1	Kegiatan.....				
2	Kegiatan.....				
3	Kegiatan.....				
<b>Dst</b>	.....				

\* HASIL RESES DPRD

\* MUSRENBANG

### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2020-2024 yang merupakan tema pembangunan Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi Misi Presiden tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata Dengan memperhatikan hal tersebut BKPM telah menetapkan dua arah kebijakan yaitu:

1. Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal
2. Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- 1) Arah Kebijakan pertama: Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal

DPM-PTSP Kabupaten Mamuju terus meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan setiap tahunnya dengan program inovasi Pemerintah Kabupaten Mamuju diantaranya adalah penerbitan izin untuk pelaku Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) ditempat melalui sistem perizinan online.

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanaman modal melalui Peningkatan peran PMDN, khususnya UMKM dan Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan penanaman modal antar Pemerintah Pusat, serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
2. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing melalui peningkatan kemudahan berusaha dan peningkatan kemitraan Antara pelaku usaha dan UMKM;
3. Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal melalui Peningkatan kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan fungsi teknis penanaman modal daerah; dan Peningkatan koordinasi dengan K/L dan daerah untuk pemanfaatan OSS;
4. Meningkatkan efektifitas promosi penanaman modal melalui Peningkatan Pelayanan Perizinan Berusaha, antara lain melalui:
  - a. Penyempurnaan sistem OSS
  - b. Integrasi sistem K/L ke sistem OSS
  - c. Standardisasi Pelayanan Perizinan Berusaha (SPPB)
  - d. Bimbingan teknis pelayanan perizinan berusaha terhadap aparatur pusat dan daerah
  - e. Sosialisasi pelayanan perizinan berusaha
  - f. Layanan berbantuan OSS
  - g. Layanan pengaduan
  - h. Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan dan calon penanam modal dalam pemanfaatan OSS
5. Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman

modal melalui Optimalisasi pemanfaatan OSS untuk mendukung fungsi pengendalian dalam rangka meningkatkan ketaatan perusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui :
  - 1) Peningkatan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berintegritas, melalui:
    - a. Perencanaan pemenuhan ASN sesuai kebutuhan organisasi;
    - b. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan standar kompetensijabatan;
    - c. Pengembangan kompetensi ASN;
    - d. Pelaksanaan *assessment test*;
  - 2) Peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan organisasi, melalui:
    - a. Penyusunan dan penerapan proses bisnis;
    - b. Penyusunan dan penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP);
    - c. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi;

- 2) Arah kebijakan kedua peningkatan penanaman modal yang berkualitas untuk mendorong Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2021-2026 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut:

- a) Mendorong peningkatan penanaman modal dibidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja
  1. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor jasa

formal untuk peningkatan perekonomian yang tinggi

2. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor industri manufaktur yang padat karya
  3. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor yang dapat memanfaatkan kapasitas dan kualitas SDM yang telah tersedia.
- b) Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal, dengan:
1. Mendorong peningkatan efisiensi produksi melalui pembaharuan teknologi;
  2. Mendorong peningkatan angka *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.
- c) Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi
1. Mendorong peningkatan penanaman modal pada bidang usaha yang diwajibkan untuk bermitra dan/atau melakukan transfer pengetahuan dan teknologi
  2. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya pelaksanaan kemitraan usaha
  3. Mendorong pemberian insentif khusus bagi perusahaan yang melakukan kegiatan *Research & Development* (R&D) serta pengembangan SDM.
- d) Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar, dengan:
1. Mendorong peningkatan peran perusahaan, baik PMA maupun PMDN, dalam rantai industri global
  2. Mendorong pembukaan pasar yang lebih luas bagi perusahaan nasional, khususnya UMKM, melalui peningkatan kualitas produk dan strategi pemasarannya

Sebagai institusi penanaman modal di daerah, DPM-PTSP turut mendukung prioritas pembangunan nasional bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengkoordinasikan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dengan OPD teknis agar dapat dipertimbangkan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),

diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja-OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antarperencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana organisasi perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

### 3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Tema RKPD Tahun 2024 Sulawesi Barat yaitu “Peningkatan Ekonomi Inklusif dan Daya Saing Sumber Daya Manusia” sedangkan prioritas pembangunan RKPD tahun 2024 adalah :

1. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan Daerah terdiri atas :
  - a. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Sektor Unggulan Daerah  
Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui Dukungan Sarana Prasarana, Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah, Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam Mendukung Distribusi Barang/Jasa, Penguatan Pertanian berbasis Korporasi Petani dalam Meningkatkan Kemitraan dan Jaringan Pemasaran, Meningkatkan Kualitas Produk dan Pemasaran Produk Unggulan, Pengembangan Pertanian berbasis Kawasan termasuk Food Estate dan Shrimp Estate, Optimalisasi Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam Menekan Dampak Inflasi melalui penguatan Rantai Pasok (Supply Chain), Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah.
  - b. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Industri, Jasa Produktif dan Pariwisata  
Penguatan SDM dan Pemberdayaan IKM/UMKM melalui Pelatihan dan Pendampingan serta Fasilitasi terhadap Pembiayaan Mikro dan Legalitas Usaha dan Produk (Sertifikat Halal, P-IRT, Izin Edar), Penguatan Rantai Nilai (Value Chain) Komoditi Potensial dari Input, Produksi, Pengolahan, Distribusi, Logistik dan Transportasi serta Pasar Lokal dan Ekspor, Peningkatan Hilirisasi Industri Komoditas berbasis Produk Unggulan Daerah dan berorientasi Ekspor, Penguatan Teknologi dan Inovasi dalam Menunjang Promosi, Pemasaran dan Branding, Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital, serta Penguatan Kemitraan, Pengembangan Pariwisata Terintegrasi serta Berbasis E-Tourism dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif dan Perlindungan terhadap Hasil Kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif (HAKI)
  - c. Perbaiki Iklim Usaha dan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Investasi dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah



Penguatan Dukungan Sarana dan Prasarana Ekspor dalam menunjang Investasi, Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Konektivitas dalam mendukung Transportasi dan Distribusi Barang, Peningkatan Kerjasama investasi dan pengembangan Dunia, Usaha dan Kewirausahaan antar Pemerintah Daerah, BUMD ataupun Swasta, Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui dukungan regulasi dan kemudahan perizinan, Memperluas Lapangan Pekerjaan melalui Penciptaan Wirausaha Baru dan Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, Penguatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Pengembangan Strategi Promosi yang Fokus, Terarah dan Inovatif, Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja melalui Penguatan Vokasi dan Kompetensi serta Sertifikasi Tenaga Kerja Sektor Produktif.

d. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Perluasan Jangkauan Perlindungan Sosial, Memperkuat Pelaksanaan Bantuan Sosial Tepat Sasaran Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat, Penguatan pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, Intervensi Penurunan Kemiskinan berdasarkan lokus prioritas, Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, Dampak Bencana, serta Kawasan Permukiman Kumuh, Penguatan Sistem Pendataan Masyarakat Miskin, Penguatan Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

2) Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas

3) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa

Adapun arah kebijakan Sulawesi Barat Tahun 2024 yaitu:

1. Mempertahankan momentum pertumbuhan yang relatif tinggi melalui diversifikasi kegiatan ekonomi
2. Mendorong perannya sebagai salah satu lumbung pangan nasional
3. Memantapkan perannya sebagai hub dan pintu gerbang perdagangan internasional di kawasan timur.
4. Menguatkan mitigasi bencana dan pemulihan pascabencana
5. Mendorong transformasi perekonomian wilayah menjadi basis hilirisasi komoditas unggulan wilayah

a. Strategi pertumbuhan

1. Memperkuat pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui percepatan realisasi investasi serta optimalisasi peran kawasan seperti KEK/KI Palu, KEK Bitung, KI Takalar, serta DPP Manado-Likupang/KEK Likupang, DPP Wakatobi, dan DPP Toraja-Makassar-Selayar.
2. Meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan untuk mendukung pengembangan sektor industri dan pariwisata, termasuk W M Makassar dan WM Manado.
3. Mempercepat pengembangan infrastruktur penghubung antarwilayah yang meliputi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan keterkaitan Kawasan strategis dengan kawasan penyangganya, serta infrastruktur laut dan udara yang dapat menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di Wilayah Sulawesi dengan wilayah lainnya.
4. Memperkuat forum kerja sama regional Wilayah Sulawesi serta meningkatkan investasi melalui perbaikan pelayanan perizinan untuk meningkatkan daya saing wilayah.
5. Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah.
6. Mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah.

b. Strategi Pemerataan

1. Memperluas cakupan dan kualitas pelayanan dasar, khususnya di bidang rakyat, air minum dan sanitasi, sosial, dan trantibumlimnas. Fokus peningkatan bidang pendidikan diselaraskan dengan kebutuhan input industrialisasi Wilayah Sulawesi, yaitu pendidikan menengah, pendidikan kejuruan/vokasional, dan Pendidikan tinggi terapan
2. Meningkatkan pengembangan produk unggulan di kawasan perdesaan, Kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta daerah tertinggal.

3. Mempercepat penyambungan jaringan transportasi pengumpan (feeder) yang menghubungkan kota-kota kecil dan kawasan perdesaan dengan jaringan transportasi utama Trans Sulawesi.
4. Meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Sulawesi serta peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel.
5. Mengoptimalkan fungsi dan peran GWPP dalam rangka sinergi pusat-daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah.
6. Memperkuat upaya pengurangan risiko bencana dan memantapkan pemulihan kondisi sosial ekonomi akibat dampak bencana di berbagai wilayah di Sulawesi, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat

### 3.3 Tujuan dan Sasaran Renja DPM-PTSP

Tujuan dan sasaran dalam Renja DPMPTSP Kabupaten Mamuju Tahun 2024 pada hakekatnya merupakan penjabaran pelaksanaan urusan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arahan dan Batasan proses pencapaian tujuan. Misi DPMPTSP Kabupaten Mamuju yaitu Misi ke-5 **Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal.**

Dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dengan di formulasikan tujuan ini, maka DPMPTSP Kabupaten Mamuju dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dan memenuhi visi dan pelaksanaan misinya. Untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Dalam Renstra 2021-2026 DPMPTSP, Tujuan Renstra adalah **“Meningkatkan Investasi Daerah” dengan Indikator Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA.** Untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka DPMPTSP Kabupaten Mamuju merumuskan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal dengan indikator: Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal dengan indikator IKM
3. Terselenggaranya Birokrasi DPM-PTSP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan Indikator Nilai AKIP

### 3.4 Program dan Kegiatan

Berdasarkan pada Renstra, program yang akan dilaksanakan DPM-PTSP Kabupaten Mamuju Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## **2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - Penetapan Kebijakan daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman modal
  - FasilitasiKemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota
- b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota

## **3. Program Promosi Penanaman Modal**

- a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota

## **4. Program Pelayanan Penanaman Modal**

- a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
  - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  - Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
  - Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

**6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
  - Bimbingan Tekhnis kepada Pelaku Usaha
  - Pengawasan Penanaman Modal

**7. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

- a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi.

TABEL T.C. 33  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kenutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Urusan Penunjang Pemerintahan Umum								
2 1 8						Penanaman Modal								
2	18	01				<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	3,268,739,024	APBD		100	6.061.957.339
2	18	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	14,676,780	APBD		100%	16,144,458
2	18	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	1,731,500	APBD		2 dokumen	804,716
2	18	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	2,638,800	APBD		1 Dokumen	1,807,740



2	18	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	Dokumen	2, 458, 200	APBD	1	Dokumen	2, 704, 020
2	18	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	Dokumen	2, 474, 400	APBD	1	Dokumen	2, 721, 840
2	18	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1	Dokumen	1, 427, 200	APBD	1	Dokumen	1, 569, 920
2	18	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	734, 800	APBD	1	Laporan	808, 280
2	18	1	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	3, 211, 880	APBD	4	Laporan	3, 533, 068
2	18	01	2	02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	2, 718, 096, 144	APBD	100	Persen	2. 989. 905. 75 8
2	18	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	33	Orang/Bulan	2, 646, 555, 244	APBD	38	Orang/Bulan	2. 911. 210. 76 8
2	18	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dokumen	59, 087, 900	APBD	4	Dokumen	64, 996, 690

2	18	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		2	Laporan	12,453,000	APBD		2	Laporan	13,698,300
2	18	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		100	Persen	3,289,400	APBD		100	Persen	3,618,340
2	18	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4	Laporan	3,289,400	APBD		4	Laporan	3,618,340
2	18	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi kepegawaian Pada Perangkat Daerah		100	Persen	38,741,000	APBD		100	Persen	42,615,100
2	18	01	2	05	02	Pengadaan Pakaiana Dinas Beserta Atribut dan kelengkapannya	Jumlah Paket Pakai an Di nas beserta Atribut Kelengkapan		0	Paket	0	APBD		0	Orang	0
2	18	01	2	05	03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		33	Dokumen	2,000,000	APBD		33	Dokumen	2,200,000
2	18	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1	Orang	36,741,000	APBD		1	Orang	40,415,100
2	18	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100	Persen	30,130,000	APBD		100	Persen	33,143,000

2	18	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	Unit	630,000	APBD		0	Unit	693,000
2	18	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2	Unit	26,500,000	APBD		3	Unit	29,150,000
2	18	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	Unit	0	APBD		0	Unit	0
2	18	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	Unit	0	APBD		0	Unit	0
2	18	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	Unit	3,000,000	APBD		1	Unit	3,300,000
2	18	01	2	08	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase belangan administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas		100	Persen	113,422,700	APBD		100	Persen	124,764,970
2	18	01	2	08	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1	Paket	2,750,000	APBD		5	Paket	3,025,000
2	18	01	2	08	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		9	Paket	4,287,400	APBD		24	Paket	4,716,140
2	18	01	2	08	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0	Paket	0	APBD		0	Paket	0

2	18	01	2	08	04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1	Paket	1, 584, 000	APBD		1 Paket	1, 742, 400
2	18	01	2	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		18	Laporan	104, 801, 300	APBD		30 Laporan	115, 281, 430
2	18	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100	Persen	310, 680, 000	APBD		100%	341, 748, 000
2	18	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3	Laporan	207, 480, 000	APBD		3 Laporan	228, 228, 000
2	18	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	Laporan	28, 800, 000	APBD		1 Laporan	31, 680, 000
2	18	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	Laporan	74, 400, 000	APBD		12 Laporan	81, 840, 000
2	18	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara		100	Persen	39, 703, 000	APBD		100 Persen	43, 673, 300
2	18	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		14	Unit	33, 753, 000	APBD		14 Unit	37, 128, 300

2	18	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	5,950,000	APBD		10	Unit	6,545,000
2	18	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	0	APBD		0	Unit	0
<b>2</b>	<b>18</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				<b>634,516,220</b>	APBD				<b>669,598,600</b>
2	18	02	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIPENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Penanaman Modal	100	Persen	23,645,720	APBD		100%		10,255,300
2	18	02	2	01	00	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah regulasi urusan pemerintah daerah	100	%	14,322,720	APBD	0	100%		0
2	18	02	2	01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	10,332,000	APBD		3	Dokumen	11,365,200

2	18	02	2	01	03	Fasilitasi kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKMd daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	3	Dokumen	3,990,720	APBD	3	Dokumen	15,000,000
2	18	02	2	02	00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi investasi tersedia	100	%	9,323,000	APBD	100%		10,255,300
2	18	02	2	02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	7,537,000	APBD	1	Dokumen	8,290,700
2	18	02	2	02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1,786,000	APBD	1	Dokumen	1,964,600
2	18	03	0	00	00	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Penekatan Investor</b>	<b>51</b>	<b>investor</b>	<b>4,615,000</b>	APBD	<b>51</b>	<b>Investor</b>	<b>2,709,300</b>
2	18	03	2	01	00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Promosi Investasi diikuti	33	%	4,615,000	APBD	33%		2,709,300
2	18	03	2	01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Dokumen	2,152,000	APBD	1	Dokumen	2,367,200
2	18	03	2	01	03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal kab/kota	1	Dokumen	2,463,000	APBD	1	Dokumen	2,709,300

2	18	04	0	00	00	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal</b>		<b>100 %</b>	<b>59,999,500</b>	APBD		<b>100 Persen</b>	<b>55,752,400</b>
2	18	04	2	01	00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan online		100 %	59,999,500	APBD		100%	55,752,400
2	18	04	2	01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		2 Dokumen	9,315,500	APBD		2 Dokumen	10,247,050
2	18	04	2	01	06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		97 Pelaku usaha	35,684,500	APBD		100 Pelaku usaha	39,252,950
2	18	04	2	01	07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		26 Pelaku usaha	3,852,500	APBD		26 Pelaku usaha	4,237,750

2	18	04	2	01	08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	110	Keg. Usaha	11,147,000	APBD		329 Keg. Usaha	12,261,700
2	18	05	0	00	00	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal</b>	85	%	532,100,000	APBD		85%	585,310,000
2	18	05	2	01	00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang melaporkan LKPM	100	%	532,100,000	APBD		100	585,310,000
2	18	05	2	01	04	Penyellesaian permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyellesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	15	Keg. Usaha	34,632,000	APBD		15 Keg. Usaha	38,095,200
2	18	05	2	01	05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	350	Pelaku usaha	332,578,300	APBD		350 Pelaku usaha	365,836,130
2	18	05	2	01	06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha	90	Keg. Usaha	164,889,700	APBD		13 Keg. Usaha	181,378,670



							dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha								
2	18	06					<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Laboran database Perizinan dan Non Perizinan</b>		<b>100 %</b>	<b>14, 156, 000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>15, 571, 600</b>
2	18	06	2	01			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengolahan Data dan Penvusunan Laporan		100 %	14, 156, 000	APBD		100%	15, 571, 600
2	18	06	2	01	01		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Diteliti dan Dimanfaatkan		12 Dokumen	14, 156, 000	APBD		12 Laporan	15, 571, 600
											<b>3, 903, 255, 244</b>				<b>6, 061, 957, 339</b>

## BAB IV RENCANA KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program, kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 yang telah dirumuskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituangkan dalam table 4.1 yang dapat dilihat sebagai berikut :

**TABEL 4.1  
RENCANA KEGIATAN DAN PENDANAAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. MAMUJU**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7
						<b>Urusan Penunjang Pemerintahan Umum</b>					
<b>2</b>	<b>18</b>					<b>Penanaman Modal</b>					
2	18	01				<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>	<b>Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		100 %	3.268.739.024	APBD
2	18	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	14,676,780	APBD
2	18	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	1,731,500	APBD
2	18	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	2,638,800	APBD
2	18	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	2,458,200	APBD
2	18	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1	2,474,400	APBD

2	18	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1	Dokumen	1, 427, 200	APBD
2	18	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	734, 800	APBD
2	18	1	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	3, 211, 880	APBD
2	18	01	2	02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persentase	2. 718. 096. 144	APBD
2	18	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	33	Orang/Bulan	2. 646. 555. 244	APBD
2	18	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dokumen	59, 087, 900	APBD
2	18	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2	Laporan	12, 453, 000	APBD
2	18	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	Persentase	3, 289, 400	APBD
2	18	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	3, 289, 400	APBD
2	18	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100	Persentase	38, 741, 000	APBD

2	18	01	2	05	02	Pengadaan Pakai ana Di nas Beserta Atri but dan kel engkapannya	Jum lah Paket Pakai an Di nas beserta Atri but Kel engkapan	0	P a k e t	0	APBD
2	18	01	2	05	03	Pendataan dan Pengol ahan Admi ni strasi Kepegawai an	Jum lah Dokumen Pendataan dan Pengol ahan Admi ni strasi Kepegawai an	33	D o k u m e n	2, 000, 000	APBD
2	18	01	2	05	09	Pendi di kan dan Pel ati han Pegawai Berdasar kan Tugas dan Fungsi	Jum lah Pegawai Berdasar kan Tugas dan Fungsi yang Mengi kuti Pendi di kan dan Pel ati han	1	O r a n g	36, 741, 000	APBD
2	18	01	2	07		Pengadaan Bara ng Mi lik Daerah Penuni ang Urusan Pemer intah Daerah	Persentase ketersedi aan bar a ng mi lik daerah penuni ang urusan pemer intah daerah	100	P e r s e n	30, 130, 000	APBD
2	18	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jum lah Paket Mebel yang Di sedi akan	1	U n i t	630, 000	APBD
2	18	01	2	07	06	Pengadaan Peral atan dan Mes in Lai nnya	Jum lah Uni t Peral atan dan Mes in Lai nnya yang Di sedi akan	2	U n i t	26, 500, 000	APBD
2	18	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kant or atau Bangunan Lai nnya	Jum lah Uni t Gedung Kant or atau Bangunan Lai nnya yang Di sedi akan	0	U n i t	0	APBD
2	18	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kant or atau Bangunan Lai nnya	Jum lah Uni t Sarana dan Prasarana Gedung Kant or atau Bangunan Lai nnya yang Di sedi akan	0	U n i t	0	APBD
2	18	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kant or atau Bangunan Lai nnya	Jum lah Uni t Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kant or atau Bangunan Lai nnya yang Di sedi akan	1	U n i t	3, 000, 000	APBD
2	18	01	2	08	00	Admi ni strasi Umum Perangka t Daerah	Persentase bel avanan admi ni strasi umum perangka t daerah yang berkual itas	100	P e r s e n	113. 422. 700	APBD
2	18	01	2	08	01	Penyedi aan Komponen Instal asi Li stri k/Penerangan Bangunan Kant or	Jum lah komponen instal asi li stri k/penerangan bangunan kant or	1	P a k e t	2, 750, 000	APBD
2	18	01	2	08	02	Penyedi aan Peral atan dan Perlengkapan Kant or	Jum lah Paket Peral atan dan Perlengkapan Kant or yang Di sedi akan	9	P a k e t	4, 287, 400	APBD
2	18	01	2	08	03	Penyedi aan Bara n Logi stik Kant or	Jum lah Paket Bara n Logi stik Kant or yang Di sedi akan	0	P a k e t	0	APBD
2	18	01	2	08	04	Penyedi aan Bara ng Cetakan dan Penggandaan	Jum lah Paket Bara ng Cetakan dan Penggandaan yang Di sedi akan	1	P a k e t	1, 584, 000	APBD

2	18	01	2	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18	Laporan	104,801,300	APBD
2	18	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persentase	310.680.000	APBD
2	18	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	207.480.000	APBD
2	18	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	28,800,000	APBD
2	18	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	74,400,000	APBD
2	18	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	100	Persentase	39,703,000	APBD
2	18	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	Unit	33,753,000	APBD
2	18	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	5,950,000	APBD
2	18	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	0	APBD
2	18					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BI DANG PENANAMAN MODAL</b>				<b>634.516.220</b>	<b>APBD</b>
2	18	02	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Penanaman Modal	100	Persentase	23,645,720	APBD
2	18	02	2	01	00	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah regulasi urusan pemerintah daerah	100%		14,322,720	APBD

2	18	02	2	01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	10,332,000	APBD
2	18	02	2	01	03	Fasilitasi kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKMDi daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	3	Dokumen	3,990,720	APBD
2	18	02	2	02	00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi investasi tersedia	100	%	9,323,000	APBD
2	18	02	2	02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	7,537,000	APBD
2	18	02	2	02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1,786,000	APBD
2	18	03	0	00	00	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Peningkat an Investor</b>	<b>51</b>	<b>investor</b>	<b>4,615,000</b>	<b>APBD</b>
2	18	03	2	01	00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Promosi Investasi investasi diikuti	33	%	4,615,000	APBD
2	18	03	2	01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Dokumen	2,152,000	APBD
2	18	03	2	01	03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal kab/kota	1	Dokumen	2,463,000	APBD
2	18	04	0	00	00	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>59,999,500</b>	<b>APBD</b>
2	18	04	2	01	00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan online	100	%	59,999,500	APBD

2	18	04	2	01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	9,315,500	APBD
2	18	04	2	01	06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	97	Pelaku usaha	35,684,500	APBD
2	18	04	2	01	07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	26	Pelaku usaha	3,852,500	APBD
2	18	04	2	01	08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	110	Keg. Usaha	11,147,000	APBD
2	18	05	0	00	00	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal</b>	50	%	532.100.000	APBD
2	18	05	2	01	00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang melaporkan LKPM	85	%	532.100.000	APBD
2	18	05	2	01	04	Penyelesaian permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	15	Keg. Usaha	34,632,000	APBD
2	18	05	2	01	05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan	350	Pelaku usaha	332,578,300	APBD

						Berusaha Berbasis Risiko					
2	18	05	2	01	06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Di analisa dan Divifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	90	Kegiatan Usaha	164, 889, 700	APBD
2	18	06				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Laporan database Perizinan dan Non Perizinan</b>	<b>100 %</b>		<b>14, 156, 000</b>	<b>APBD</b>
2	18	06	2	01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengolahan Data dan Penvusunan Laporan	100 %		14, 156, 000	APBD
2	18	06	2	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Di olah, Di kaji dan Di manfaatkan	12	Dokumen	14, 156, 000	APBD
										<b>3, 903, 255, 244</b>	

## BAB V PENUTUP

### 1.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku



(*stakeholders*) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja DPM-PTSP ini diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala DPM-PTSP dan di dalam pelaksanaannya akan senantiasa dilakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi oleh Kepala Dinas DPM-PTSP bersama unsur pimpinan DPM-PTSP terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Anggaran dan Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Renja DPM-PTSP Kabupaten Mamuju merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Renja DPM-PTSP Kabupaten Mamuju selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Merupakan Dokumen rencana kegiatan DPM-PTSP yang akan dilaksanakan selama tahun 2024. Renja ini menjadi

acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju tahun 2024

**MAMUJU, JULI 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KAB. MAMUJU**



**Hj. HASNAWATY SYAM, SE.M.Si**

**Pangkat : Pembina Utama Muda - IV/c**

**NIP : 19680928200604 2 002**